



**LAPORAN KINERJA TW I  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LUWU TIMUR**





**LAPORAN KINERJA TW I  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LUWU TIMUR**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dan atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja TW I Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur periode Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam kurun Triwulan terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Sekretariat DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021- 2026. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah merupakan wadah sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 1 tahun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kami berharap, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD.

Malili, 2 April 2025  
Sekretaris DPRD,



**ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si**

Pangkat : Pembina TK I

NIP.197603162008031001



## DAFTAR ISI

|                                                            | hal.      |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                    | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                             | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                   | 1         |
| 1.2 Gambaran Umum Organisasi .....                         | 2         |
| 1.3 Sumber Daya Manusia .....                              | 7         |
| 1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah..... | 9         |
| 1.5 Strategi Organisasi .....                              | 10        |
| 1.6 Landasan Hukum .....                                   | 10        |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                            | 11        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                     | <b>13</b> |
| 2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....                 | 13        |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran .....                               | 16        |
| 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....                      | 21        |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Utama .....                         | 22        |
| 2.5 Rencana Anggaran .....                                 | 30        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                  | <b>32</b> |
| 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD KAB. Luwu Timur.....  | 34        |
| 3.2 Analisis Capain Kinerja .....                          | 35        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                 | <b>89</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....                                        | 89        |
| 4.2 Langkah Perbaikan Kinerja.....                         | 90        |
| 4.3. Saran .....                                           | 91        |



**BAB 1****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota. Dasar hukum penyusunan laporan Kinerja TW I adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun laporan Kinerja Triwulan I.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

**1.2 Gambaran Umum Organisasi**

Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang keedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timur Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

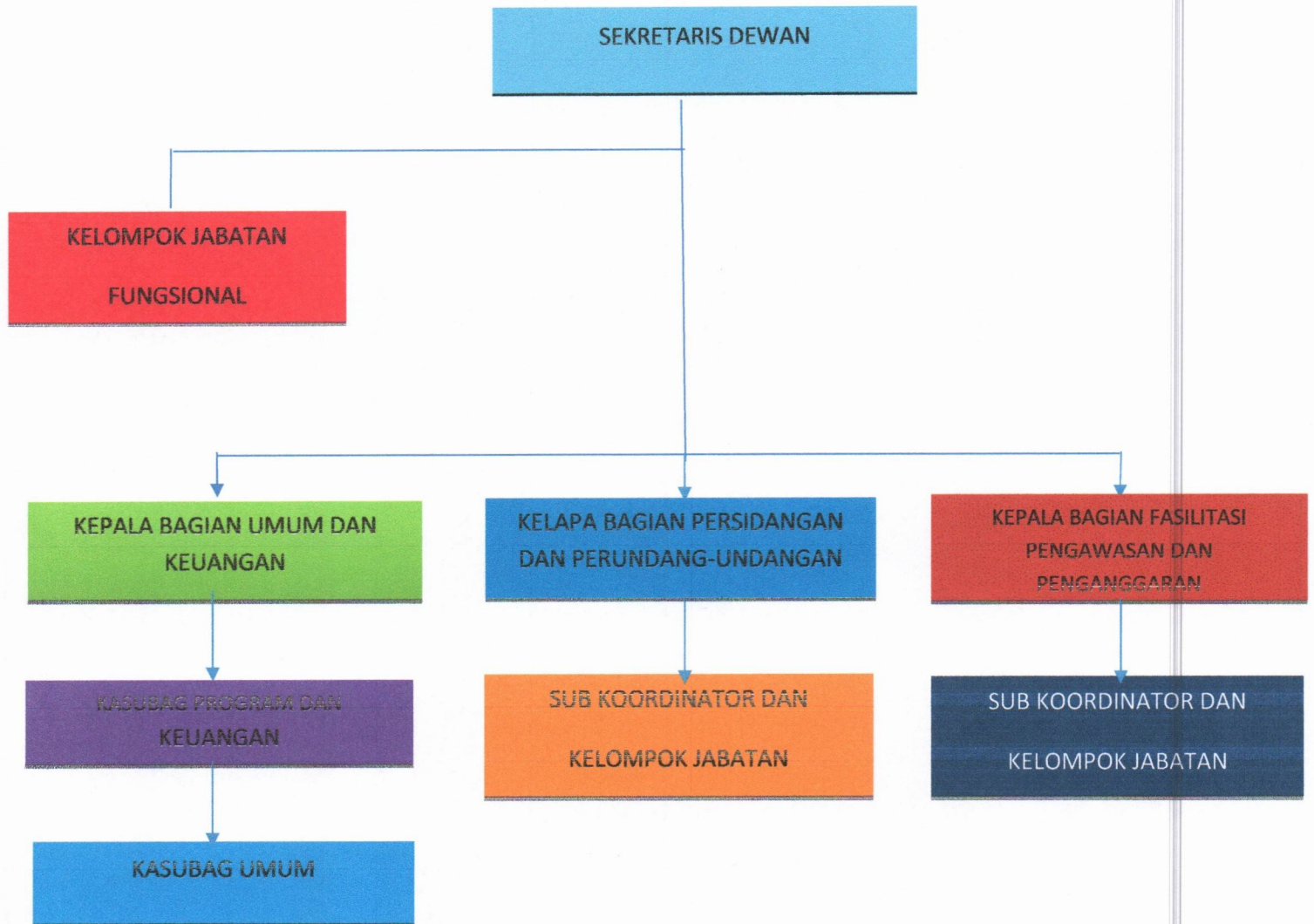
**Tugas :** Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

**Fungsi :**

1. Penyelenggaraan Adminitrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga Ahli yang diperlukan DPRD;



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



### 1.3 Sumber Daya Manusia

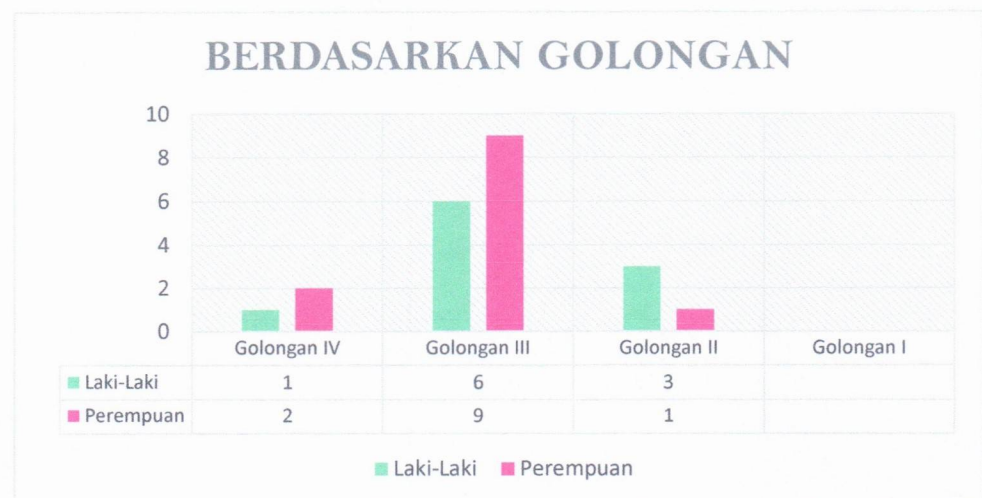
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 51 Orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 23, PPPK 4 Orang dan Tenaga 18 Orang (Tenaga Administrasi 10 Orang, Cleaning Service 21 Orang, Sopir 5 Orang). Struktur tingkat Pendidikan SDM Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut.

**Grafik. 1**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, Januari 2025

**Grafik. 2**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025





Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

#### 1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis antara lain:

1. Pemahaman yang berbeda antara sekretariat DPRD dan DPRD terhadap penerapan peraturan dan perundang-undangan dalam implementasi kerja kegiatan-kegiatan DPRD.
2. Penyebarluasan teknologi yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya masi belum optimal sehingga penggunaan tekhnologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.
3. Rencana Kerja yng telah di tentukan selalu berubah tidak sesuai jadwal yang telah di tentukan.
4. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.

#### 1.5 Strategi Organisasi

Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga permasalahan yang timbul bisa teratasi. Hal ini merupakan strategi kebijakan, kegiatan dan program, serta pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Sekretariat DPRD telah melakukan usaha dari berbagai aspek yang memberikan peningkatkan kinerja organisasi. Untuk aspek internal, Sekretariat DPRD melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja dalam melakukan tugas, bimbingan teknis dan sosialisasi.



Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan Sekretariat DPRD serta pembinaan organisasi ke arah birokrasi yang profesional.

#### 1.6 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timu.

## 1.7 Sistematika Penulisan

### **Bab. I - Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

### **Bab II - Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

### **Bab III - Akuntabilitas Kinerja**

#### *A. Capaian Kinerja Organisasi*

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

#### *B. Realisasi Anggaran*

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV – Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

**BAB 2****PERENCANAAN  
KINERJA****2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

**P**eningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Sekretariat DPRD Menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

 **Visi dan Misi** **Visi**

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten Luwu Timur, yaitu : **“LUWU TIMUR YANG**



**BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA".** Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni "Berkelanjutan", "Lebih Maju", dan "Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya". Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| Visi                                                                                                | Pokok Visi                            | Penjelasan Visi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"</b> | "Berkelanjutan"                       | Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di alam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. |
|                                                                                                     | "Lebih Maju"                          | Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | "Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya" | Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026



### Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (Enam) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- b. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- c. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- d. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- f. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur melaksanakan **misi ke-4 (Empat)**, dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Misi IV yaitu : **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.**

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 mengacu pada Misi ke 4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu :



- Misi ke 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
- Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
- Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD.
- Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik.
- Indikator : a) Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda dengan target 100%.  
b) Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Target 100%
- Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Sekretariat DPRD
- Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
- Indikator : Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat DPRD melakukan revisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dengan Indikator Persentase

Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda dan Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Sekretariat DPRD sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2021-2026 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

| NO | TUJUAN                                                                                   | SASARAN                                                                                                                                                                            | INDIKATOR SASARAN                                 | KONDISI   | Target Kinerja pada Tahun |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                   | AWAL 2021 | 2022                      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|    | Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah | 80%       | 90%                       | 90%  | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti  | 90%       | 90%                       | 90%  | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah               |                                                                                                                                                                                    | Rata-rata capaian program PD                      | 64,71     | 75                        | 75   | 80   | 80   | 85   |

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.



**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur**  
**(Versi PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021)**

| NO | TUJUAN                                                                                   | SASARAN                                                                                                                                                                             | INDIKATOR SASARAN                                                                | KONDISI   | Target Kinerja pada Tahun |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | AWAL 2021 | 2022                      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda | 72,27%    | 90%                       | 90%  | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti                                 | 83,33%    | 90%                       | 90%  | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah               | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD                                                                                                                                 | Nilai SAKIP                                                                      | 64,71     | 75                        | 75   | 80   | 80   | 85   |

### 2.1.1 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**

| SASARAN                                                                                                                                                                                   | PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik</b> | 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD<br>Kegiatan<br>1) Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD<br>2) Pembahasan Kebijakan Anggaran |



**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD**

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota :
  - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD
  - 2) Administrasi keuangan PD
  - 3) Administrasi Umum PD
  - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**2.3 Strategi dan Arah Kebijakan**

Sekretariat DPRD dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal, sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan Administrasi
2. Sasaran strategis Meningkatkan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan dan Anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan strategi pemenuhan dokumen perencanaan sesuai ketentuan, penguatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan/tahunan, penguatan tindak lanjut hasil monitoring, dan penguatan laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

Sedangkan arah kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Sasaran strategis Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab. Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.



2. Sasaran strategis Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan arah kebijakan peningkatan kualitas perencanaan sesuai ketentuan, peningkatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan/tahunan, peningkatan tindak lanjut hasil monitoring, dan peningkatan kualitas laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

#### **2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran.

Sesuai hasil pendampingan dari Kemenpan dimana berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam penyusunan kinerja harus dimulai dengan penetapan sasaran kinerja yang ingin dicapai OPD (Outcome) dan selanjutnya mengidentifikasi faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan (CSF) dan menguraikan CSF tersebut atau hal-hal yang dapat mendukung untuk pencapaian sasaran OPD tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat DPRD melakukan penyusunan Perjanjian kinerja yang berbasis kinerja (Pohon Kinerja). Penyusunan PK 2024 Sekretaris DPRD mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan Renstra, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, IKU dan Anggaran.

Berikut ini Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Sekretariat DPRD

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                              | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 100%   |
|    |                                                                                                                                                                                    | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti                               | 100%   |
|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |        |
|    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD                                                                                                                                | Nilai SAKIP                                                                    | 80     |

Program dan Pagu Anggaran Pokok Tahun 2025

| NO            | PROGRAM                                               | ANGGARAN (Rp)           | KET  |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 1             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 28.584.558.694,-        | APBD |
| 2             | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD    | 17.903.779.061,-        | APBD |
| <b>JUMLAH</b> |                                                       | <b>46.488.337.755,-</b> |      |

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Sekretariat DPRD Tahun 2025.



**Tabel 2.5**  
**Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan**

| NO  | SASARAN                                                                                                                                                                            | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan Sasaran Kinerja ini adalah Meningkatkan fungsi legislasi, yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan yaitu mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dan fungsi anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah APBD. Membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan Penganggaran. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : Tahun 2021 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.</li> </ul> |
| NO. | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                  | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya OPD yang mengajukan ranperda sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| NO. | TARGET                                                                                                                                                                             | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 100%                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Target Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2023 capaian Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda 88,89% atau 15 Ranperda yang ditargetkan dan terealisasi 12 Ranperda menjadi Perda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|     |                                                     | Persentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda di tahun 2024 di targetkan 100% dan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat tercapai 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | INDIKATOR KINERJA                                   | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bertujuan untuk mengukur sejauh mana fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD, baik itu Komisi DPRD, Badan Anggaran, Bapemperda dan Badan Kehormatan. terhadap pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kegiatan lainnya berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Dari hasil kegiatan tersebut sesuai kebutuhan maka dirumuskan Rekomendasi yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Instansi terkait.</li> </ul> |
| NO. | TARGET                                              | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | 100 %                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Target Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 Sekretariat DPRD telah Mencapai Target 100%. Dengan Rekomendasi yang telah di tindaklanjuti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NO  | SASARAN                                             | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja</li> </ul>                                                                                                                                        |
| NO. | INDIKATOR KINERJA                                   | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.  | Nilai SAKIP                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| NO. | TARGET | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 80     | Target yang ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, tahun 2024 capaian Lakip hasil evaluasi Inspektorat untuk DPRD adalah 70,80 sebagai komitmen mendukung target Kabupaten maka pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Menurun target capaiannya, dikarenakan adanya perubahan indicator sekretariat DPRD. |

Perjanjian kinerja pada Sekretariat DPRD pada tahun 2025 mengalami perubahan. Perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Sekretaris DPRD pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2024 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansu Pemerintah. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukan revisi adalah :

1. Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis atau indikator kinerja tersebut belum SMART sehingga dilakukan perbaikan.
2. Perbaikan indikator kinerja "nilai SAKIP" untuk mengukur akuntabilitas kinerja OPD.
3. Terjadinya perubahan anggaran, sehingga membutuhkan penyesuaian pada Sekretariat DPRD Tahun 2025.

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sekretariat DPRD telah menetapkan IKU yang menjadi pedoman dalam upaya mencapai kinerja, sebagai berikut :



Tabel 2.6  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026  
(Permenpan Nomor 89 Tahun 2021)

| NO | TUJUAN                                                                                   | INDIKATOR TUJUAN                                                  | SASARAN                                                                                                                                                                             | INDIKATOR SASARAN                                                                | FORMULASI                                                                                                  | Penanggungjawab                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD | Persentase Kinerja Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda | Jumlah Ranperda Yang ditetapkan di bagi dengan Jumlah ranperda yang difasilitasi unuk dibahas dikali 100 % | Bagian Persidangan dan Perundang-undangan , dan dari OPD yang mengusulkan Ranperda. |
|    |                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti                                 | Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali 100 %                       | Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Penganggaran                            |

Berdasarkan pemahaman diatas maka IKU Sekretariat DPRD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

| SASARAN                                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                            | DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                    | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUMBER DATA                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Ranperda Yang ditetapkan di bagi dengan Jumlah ranperda yang difasilitasi unuk dibahas n dikali 100 %</li> </ul> | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian Persidangan dan Perundang-undangan</li> <li>OPD terkait</li> </ul> |



|  |                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                    |                                                                                                                                        | kinerja/kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya OPD yang mengajukan ranperda sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali 100 %</li> </ul> | <p>Bertujuan untuk mengukur sejauh mana fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD, baik itu Komisi DPRD, Badan Anggaran, Bapemperda dan Badan Kehormatan. terhadap pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan</p> <p>Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kegiatan lainnya berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Dari hasil kegiatan tersebut sesuai kebutuhan maka dirumuskan Rekomendasi yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Instansi terkait.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat DPRD</li> <li>OPD terkait</li> </ul> |

## 2.5 Rencana Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok, Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebesar **Rp. 45.992.959.352,-** terdiri dari belanja pegawai **Rp 22.780.089.052,-** belanja barang dan jasa **Rp.22.432.855.300,-** belanja Modal

Peralatan dan Mesin **Rp.339.015.000,-** dan belanja modal Gedung dan Bangunan **Rp.441.000.000,-**, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun program dan anggaran APBD secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.7**  
Program dan Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2025

| NO | PROGRAM                                               | ANGGARAN (Rp)           | KET  |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 29.212.633.302,-        | APBD |
| 2  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD    | 16.780.326.050,-        | APBD |
|    | <b>JUMLAH</b>                                         | <b>45.992.959.352,-</b> |      |

Alokasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel**  
Alokasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis  
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2025

| NO | TUJUAN                                                                                    | SASARAN                                                                                                                  | INDIKATOR SASARAN                                                                | ANGGARAN (Rp)  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda | 16.780.326.050 |



|    |                                                                            |                                                            |                                                  |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                            | Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti |                |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah |                                                            | Rata-rata capaian program PD                     | 29.212.633.302 |

Sumber : DPA Sekretariat DPRD TA. 2025

Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran, dan untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut Sekretariat DPRD menetapkan 3 (tiga) indikator. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD didukung 2 (dua) program dengan 18 (Delapan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh enam) sub kegiatan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Anggaran belanja yang ada yaitu sebesar Rp. 45.992.959.352,- digunakan untuk sepenuhnya mendukung sasaran **"Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD"**.

**BAB 3****AKUNTABILITAS  
KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja TW I Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa Instansi lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Sekretariat DPRD selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja TW I (LKJ) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).



Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI<br>KINERJA | KRITERIA PENILAIAN<br>REALISASI KINERJA |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | $91 \leq 100 \%$                    | Sangat Tinggi                           |
| 2.  | $76 \leq 90 \%$                     | Tinggi                                  |
| 3.  | $66 \leq 75 \%$                     | Sedang                                  |
| 4.  | $51 \leq 65 \%$                     | Rendah                                  |



|    |        |               |
|----|--------|---------------|
| 5. | ≤ 50 % | Sangat Rendah |
|----|--------|---------------|

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

### 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur  
TW I Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                              | Satuan | Target TW I | Realisasi TW I | Capaian | Predikat Kinerja |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|---------|------------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | Persen | 25%         | 20%            | 80%     | T                |
|    |                                                                                                                                                                                    | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti                               | Persen | 25%         | 23%            | 93,33%  | ST               |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD                                                                                                                                | Nilai SAKIP                                                                    | Nilai  | 80          | 76,85          | 102,47  | ST               |

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (Indikator) yang diperjanjikan di Tahun 2025,



### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

#### SASARAN STRATEGIS I

**"Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Pelaksanaan Kebijakan Daerah"**

#### INDIKATOR I

**" Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda"**

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1  
Target Terhadap Realisasi  
TW I Tahun 2025

| No                        | Indikator Kinerja                                                                | Satuan | Tahun 2025   |                |         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|---------|
|                           |                                                                                  |        | Target TW I  | Realisasi TW I | Capaian |
| 1                         | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda | Persen | 25%          | 20%            | 800%    |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                                                                                  |        | 80% (Tinggi) |                |         |

Analisis capaian kinerja sasaran strategis " Meningkatkan Pelayanan Kinerja

Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

#### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja  
Capaian Presentase Meningkatnya Pelayanan Kinerja Sekretariatan Dalam  
Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran  
Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik  
Pada Tahun 2024

| No                        | Indikator Kinerja                                                                | Satuan | Tahun 2024   |                |         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|---------|
|                           |                                                                                  |        | Target TW I  | Realisasi TW I | Capaian |
| 1                         | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda | Persen | 25%          | 20             | 80%     |
| Rata-rata Capaian Kinerja |                                                                                  |        | 80% (Tinggi) |                |         |

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda**, target yang ditetapkan di TW I 25 % dan terealisasi 25%, dimana Jumlah Ranperda yang telah dibahas ditargetkan di TW I sebanyak 4 ranperda dan terealisasi 1 ranperda. Ada pun 3 ranperda yang Belum Terealisasi di Karenakan belum adanya surat masuk dari pihak eksekutif (bagian Hukum) terkait ranperda yang berada pada TW I sesuai SK Propemperda Tahun 2025. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan data yang



didapatkan dari *Bagian Persidangan dan Perundang-undangan*.

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2019 - 2023)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2019 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri  
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun  
(2020 – 2024)

| Indikator Kinerja 1                                                              | Capaian 2020 | Capaian 2021 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                | 2            | 3            | 4            | 5            | 5            |
| Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda | 10,29%       | 71,43%       | 85,19%       | 88,89%       | 69,23%       |

Pengukuran kinerja dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan kinerja Presentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dapat dilihat dari tabel diatas. Pada tahun 2020 diperoleh realisasi 10,29%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan realisasi 71,43%, pada tahun 2022 realisasi 85,19%, 2023 diperoleh realisasi 88,89% atau 15 ranperda terealisasi 12 ranperda sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 88,89%. Dan pada TW I Tahun 2025 dari target 25% dan terealisasi.

Peningkatan ini merupakan indikasi positif dimana Ranperda yang di fasilitasi untuk di bahas di targetkan di TW I 4 Dokumen Ranperda atau 25% terealisasi 1 ranperda, TW I

sebanyak 4 ranperda dan terealisasi 1 ranperda. Ada pun 3 ranperda yang Belum Terealisasi di Karenakan belum adanya surat masuk dari pihak eksekutif (bagian Hukum) terkait ranperda yang berada pada TW I sesuai SK Propemperda Tahun 2025.

### 3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD/Renstra (2021-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7  
Capaian Indikator Kinerja Strategis  
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur  
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

| Indikator Kinerja                                                                | Target RPJMD/Renstra 2021-2026 | Realisasi TW I Tahun 2025 | Presentase Capaian Kinerja |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda | 100%                           | 25%                       | 80%                        |

Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda pada TW I tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 25%, dikarenakan TW I sebanyak 4 ranperda dan terealisasi 1 ranperda. Ada pun 3 ranperda yang Belum Terealisasi di Karenakan belum adanya surat masuk dari pihak eksekutif (bagian Hukum) terkait ranperda yang berada pada TW I sesuai SK Propemperda Tahun 2025..

### 4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain



Salah satu cara untuk mengetahui Tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Presiden Republik Indonesia dalam Visi dan Misinya menekankan Penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada 4 (empat) aspek, yakni :

1. Kegiatan yang efisiensi dan efektif
2. Keandalan laporan keuangan
3. Pengamanan asset
4. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan

Ke-4 aspek tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Dimana pada aturan tersebut mengutamakan *hard control*, *soft control* tidak tersentuh (Integritas, Komitmen, Kepemimpinan dan Nilai Etika).

Mengenai perbandingan antara realisasi kinerja Dinas dan Standar Nasional Lainnya, tidak kami dapati indikator pembanding yang setara untuk dilakukan Analisa Perbandingan. Namun, melihat pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupten Luwu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lain **Belum ada**,

#### **5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis : **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda**
  - 1) Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda yaitu : 4 dokumen ranperda dan Terealisasi 1 Ranperda atau 8 %, hal ini dikategorikan **belum terlaksana**, dikarenakan belum adanya ranperda yang diusulkan untuk TW I tahun 2025

- Tercapainya target Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda didukung dengan ketersediaan anggaran serta adanya inisiatif dari Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD dalam upaya meningkatkan Fungsi Legislasi, dengan melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan tolak ukur dari tahun sebelumnya untuk lebih baik di tahun berikutnya.
- Selain keberhasilan, kegagalan/hambatan juga ditemui dalam proses tercapainya target, diantaranya yaitu :
  - Belum optimalnya aplikasi yang digunakan sehingga menghambat pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD.
  - Kurangnya SDM dalam pemenuhan variabel terkait ranperda yang diperlukan.
  - Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang terkait.

#### 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.9

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| Sasaran Strategis                                    | Indikator kinerja                                      | Capaian                                  | Program                                    | Indikator Kinerja                             | Target TW I | Realisasi TW II | Capaian | Rencana Tindak Lanjut                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|
| Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang | 8% (- Ranperda realisasi - ranperda) =8% | Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persentase Kegiatan Legislasi yang Fasilitasi | 25%         | 20%             | 80%     | Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2024, |



|                                                                                                                                |                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik | di tetapkan menjadi Perda |  |  |  |  |  |  | program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2025, namun TW I belum terlaksana dikarenakan belum ada usulan ranperda TW I tahun 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Sasaran strategis 1 : **Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik**

Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dengan target 4 Ranperda dan 1 Ranperda telah berhasil terealisasi sebesar 8%

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada TW I tahun 2025 yaitu :

1. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan stakeholder terkait.
2. Menfasilitasi dan mendampingi langsung dalam pembahasan ranperda.

## 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi dalam melakukan kegiatannya. Sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Efisiensi adalah ukuran Tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.457.254.550,- dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2025 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda**, terealisasi sebesar Rp. 717.840.266,-, (TW.I) sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$\begin{aligned}
 &= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{717.840.266}{7.457.254.550} \times 100\% \\
 &= 100\% - 9,63\% \\
 &= \mathbf{90,37\% \text{ Efisiensi Anggaran}}
 \end{aligned}$$

### Indikator 2 : Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

#### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti TW I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja  
Capaian Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa  
Pada Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja                                | Satuan | Tahun 2025  |                 |         |
|----|--------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|---------|
|    |                                                  |        | Target TW I | Realisasi TW II | Capaian |
| 1  | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti | Persen | 25%         | 0               | 0%      |

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti**, target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 0%. Kegiatan tersebut belum terealisasi dan akan dilaksanakan pada TW II di Tahun 2025.

Capaian Indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2020 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Capaian Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa  
Target Terhadap Realisasi selama 2 (dua) Tahun  
(2022 – 2023)

| Indikator                                        | Satuan | Tahun | Target<br>TW III | Realisasi<br>TW III | Capaian |
|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------------|---------|
| Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti | Persen | 2023  | 90%              | 100%                | 111,11% |
|                                                  |        | 2024  | 80%              | 80%                 | 100%    |

3. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Strategis  
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur  
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

| Indikator Kinerja                                | Target RPJMD/Renstra 2021-2026 | Realisasi TW I Tahun 2025 | Presentase Capaian Kinerja |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti | 100%                           | 0%                        | 0%                         |



#### 4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Sekretariat DPRD dengan target dan realisasi standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14

Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 | Standar Nasional  |                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                      |                                                  |                              | Target Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 |
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti | 100%                         | -                 | -                    |

Pada Sekretariat DPRD, sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik dengan indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti tidak mengikuti standar nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

#### 5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : **Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik**

- Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti yaitu : 100%, dengan capaian 100% hal ini dikategorikan **sangat memuaskan/berhasil** telah tercapai.
- Target dapat tercapai dengan adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan pendataan secara rutin, Ini tergantung pada SKPD lain yang bersentuhan langsung dengan kegiatan yang berkaitan pembahasan anggaran.

#### 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.15

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| Sasaran Strategis                                                                | Indikator kinerja                                | Capaian                                                                  | Program                                    | Indikator Kinerja                                      | Target TW I | Realisasi TW III | Capaian | Rencana Tindak Lanjut                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti | 100% (1 target di tw I Pembahasan Kebijakan Anggaran realisasi 1 ) =100% | Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persentase Kegiatan Kegiatan Legislasi yang Fasilitasi | 0%          | 0%               | 0%      | Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2024, program ini akan tetap dilaksanakan |





menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{6.138.125.589}{8.517.138.775} \times 100\%$$

$$= 100\% - 72.07\%$$

$$= 27,93\% \text{ Efisiensi Anggaran}$$

## SASARAN STRATEGIS II

### “MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD”

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Sakip (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.26  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2  
Target Terhadap Realisasi  
Tahun 2024

| No                        | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 |           |         |
|---------------------------|-------------------|--------|------------|-----------|---------|
|                           |                   |        | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1                         | Nilai Sakip (n-1) | Nilai  | 75         | 70,80     | 94,4    |
| Rata-rata Capaian Kinerja |                   |        |            | 94,4      |         |

Sumber : LHE Evaluasi Lakip Tahun 2024

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas



Kinerja Sekretariat DPRD' berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

**Indikator Kinerja  
NILAI SAKIP (n-1)**

**1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.27**

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja  
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD  
Pada Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 |           |         |
|----|-------------------|--------|------------|-----------|---------|
|    |                   |        | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Nilai SAKIP (n-1) | Nilai  | 80         | 70,80     | 94,4    |

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 76,65 dengan kategori BB, dengan rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.28  
Komponen Penilaian Kinerja  
Terhadap Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD

| OPD                           | Komponen Dinilai                        | Bobot | Nilai |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|
| Sekretariat DPRD              | Perencanaan Kinerja                     | 30.00 | 21.60 |
|                               | Pengukuran Kinerja                      | 30.00 | 20.40 |
|                               | Pelaporan Kinerja                       | 15.00 | 10.80 |
|                               | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 18    |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja   |                                         |       | 70.80 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |                                         |       | BB    |

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2019-2023)

Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Tahun (2019-2023), disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.29  
Nilai dan Kategori SAKIP  
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2020-2023

| Indikator   | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Kategori | Capaian Kinerja |
|-------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------------|
| Nilai SAKIP | Nilai  | 2019  | 60.00  | 58.20     | CC       | 97              |
|             |        | 2020  | 60.00  | 58.25     | CC       | 97.08           |
|             |        | 2021  | 65.00  | 64.71     | BB       | 99.55           |



|  |  |      |       |       |    |        |
|--|--|------|-------|-------|----|--------|
|  |  | 2022 | 75.00 | 71.10 | BB | 94.80  |
|  |  | 2023 | 75.00 | 76.85 | BB | 102.47 |
|  |  | 2024 | 80.00 | 70.80 | BB | 94,4   |

Sumber : Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

### 3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)

Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan Target Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2021-2026/Renstra 2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.30  
Capaian Indikator Kinerja Strategis  
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur  
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

| Sasaran Strategis | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD |                      |                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Indikator Kinerja | Target RPJMD/Renstra 2021-2026                      | Realisasi Tahun 2024 | Presentase Capaian Kinerja |
| Nilai SAKIP       | 80                                                  | 70,80                | 88,50                      |

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi dan Capaian Kinerja belum mencapai atau melebihi target Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabuapten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan rekomendasi perbaikan antara lain :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja seharusnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai si setiap

level jabatan, target kinerja kepala bidang disupport oleh target kinerja level dibawahnya sampai staf.

2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pada Kasubag. Perencanaan.
3. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, dari hasil pengukuran memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Agar Sekretaris DPRD sebagai pengambil Keputusan (Decision Maker) terlibat langsung dalam mengukur capaian kinerja bawahannya dan pejabat dibawahnya melakukan hal yang sama kepada staf.
5. Pengukuran kinerja sebaiknya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.
7. Membuat Perkada tentang tunjangan kinerja dan mekanisme pembayaran Tunjangan yang kaitannya dengan capaian kinerja.
8. Membuat pedoman pola mutasi/rotasi (terdapat penjelasan mutasi dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya (BKPSDM).
9. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dengan narasi yang memadai.
10. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmarking Kinerja)
11. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dengan rekomendasi perbaikan kinerja.
12. Mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.
13. Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
14. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.



#### **4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2024, Dimana Sekretariat DPRD Kabupaten/Provinsi Sulawesi Selatan **Belum ada.**

#### **5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan OPD**

Dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Sekretariat DPRD, keselarasan antara dokumen perencanaan harus tetap dijaga dan diperhatikan yaitu antara dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA dan LAKIP.

##### **2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

##### **3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Asset Perangkat Daerah**

Pengelolaan asset perangkat daerah dipengaruhi oleh laporan pengelolaan asset yang disusun setiap bulannya.

##### **4. Meningkatkan Kualitas Monitoring dan Pelaporan**

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan.

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Indikator kinerja ini di dukung oleh 1 Program, 10 Kegiatan dan 32 sub kegiatan, Dari 100% target kinerja yang ditetapkan terealisasi 25%. Adapun Program dan kegiatan yang mendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  10. Layanan Administrasi DPRD

## 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.584.558.694 dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 19.838.897.781,15,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$



$$= 100\% - \frac{1.457.772.662}{9.323.071.500} \times 100\%$$

$$= 100\% - 15,64\%$$

$$= 84,36\% \text{ Efisiensi Anggaran}$$

**a. Akuntabilitas Keuangan**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada TW I tahun 2025 sebesar 81,65% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 46.488.337.755,- Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 3.32

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                | JUMLAH<br>ANGGARAN | TARGET<br>TRIWULAN<br>I(BERDASARKAN<br>ANGGARAN KAS) | REALISASI ANGGARAN<br>S.D 1 Maret 2025 |           |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|    |                                                                 |                    |                                                      | (Rp.)                                  | (%)       |
|    | (2)                                                             | (4)                | (5)                                                  | (6)                                    | (7)       |
|    |                                                                 |                    |                                                      |                                        | (6/5*100) |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | 29.212.633.302     | 10.034.327.764,00                                    | 7.766.881.505,00                       | 77,40     |
| 01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 62.798.550         | 13.731.700,00                                        | 5.340.700                              | 38,89     |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | 40.197.850         | 9.100.000,00                                         | 5.340.700                              | 58,69     |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | 5.973.000          | -                                                    | -                                      | -         |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                      | 5.068.800          | -                                                    | -                                      | -         |
| 4  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 11.558.900         | 4.631.700                                            | -                                      | -         |



|    |                                                                             |               |                |             |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------|
| 02 | Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah                                  | 4.013.272.630 | 1.390.514.755  | 993.846.279 | 71,47 |
| 5  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | 3.926.248.730 | 1.374.187.055  | 979.410.579 | 71,27 |
| 6  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 87.023.900    | 16.327.700     | 14.435.700  | 88,41 |
| 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                      | 30.508.850    | 8.782.000,00   | 2.500.000   | 28,47 |
| 7  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | 30.508.850    | 8.782.000      | 2.500.000   | 28,47 |
| 04 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | 573.931.350   | 155.924.550,00 | 31.800.000  | 20,39 |
| 8  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           | 249.780.000   | 41.960.000     | 31.800.000  | 75,79 |
| 9  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  | 324.151.350   | 113.964.550    | -           | -     |
| 05 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | 1.358.260.550 | 370.595.000,00 | 132.127.990 | 35,65 |
| 10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 35.413.000    | 8.700.000      | 5.193.000   | 59,69 |
| 11 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 125.200.150   | -              | -           | -     |
| 12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                           | 7.100.000     | 2.025.000      | 750.000     | 37,04 |
| 13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | 134.755.000   | 59.193.000     | 15.272.300  | 25,80 |
| 14 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 40.000.000    | 10.000.000     | 5.345.450   | 53,45 |
| 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                    | 255.100.000   | 90.000.000     | 40.000.000  | 44,44 |
| 16 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                    | 211.924.000   | 53.677.000     | 15.762.000  | 29,36 |



|    |                                                                                                                    |                       |                         |                      |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 17 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 548.768.400           | 147.000.000             | 49.805.240           | 33,88        |
| 06 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>558.814.850</b>    | -                       | -                    | -            |
| 19 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 117.814.850           | -                       | -                    | -            |
| 20 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 441.000.000           | -                       | -                    | -            |
| 21 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 117.814.850           | -                       | -                    | -            |
| 07 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>926.466.200</b>    | <b>200.686.200,00</b>   | <b>164.863.844</b>   | <b>82,15</b> |
| 22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 51.426.200            | 13.176.200              | 12.541.000           | 95,18        |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 500.040.000           | 125.010.000             | 94.322.844           | 75,45        |
| 24 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 375.000.000           | 62.500.000              | 58.000.000           | 92,80        |
| 08 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>579.100.000</b>    | <b>199.430.000,00</b>   | <b>52.624.500</b>    | <b>26,39</b> |
| 25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 163.700.000           | 70.000.000              | 6.377.500            | 9,11         |
| 26 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 89.400.000            | 24.930.000              | 11.210.000           | 44,97        |
| 27 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 54.000.000            | -                       | -                    | -            |
| 28 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                      | 147.000.000           | 54.500.000              | 17.896.000           | 32,84        |
| 29 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 125.000.000           | 50.000.000              | 17.141.000           | 34,28        |
| 09 | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                     | <b>19.757.080.322</b> | <b>7.374.263.559,00</b> | <b>6.179.875.147</b> | <b>83,80</b> |
| 30 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | 18.853.840.322        | 6.621.023.559           | 5.945.175.147        | 89,79        |



|    |                                                                                           |                       |                         |                      |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 31 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                 | 693.240.000           | 693.240.000             | 234.700.000          | 33,86        |
| 32 | Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD                                                         | 210.000.000           | 60.000.000              |                      | -            |
| 10 | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                          | <b>1.352.400.000</b>  | <b>320.400.000,00</b>   | <b>203.903.045</b>   | <b>63,64</b> |
| 34 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                    | 1.352.400.000         | 320.400.000             | 203.903.045          | 63,64        |
|    | <b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>                                 | <b>16.780.326.050</b> | <b>6.138.837.646,00</b> | <b>2.175.612.931</b> | <b>35,44</b> |
| 01 | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                                    | <b>1.889.501.600</b>  | <b>363.698.971,00</b>   | <b>74.166.300</b>    | <b>20,39</b> |
| 35 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                 | 442.554.950           | 60.748.537              | 4.810.000            | 7,92         |
| 36 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                     | 1.446.946.650         | 302.950.434             | 69.356.300           | 22,89        |
| 02 | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                                      | <b>1.118.044.450</b>  | -                       | -                    | -            |
| 37 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                   | 78.162.350            |                         |                      | -            |
| 38 | Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS                                                         | 82.822.450            | -                       | -                    | -            |
| 39 | Pembahasan APBD                                                                           | 317.016.750           |                         |                      | -            |
| 40 | Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | 319.536.200           | -                       | -                    | -            |
| 41 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | 320.506.700           | -                       | -                    | -            |
| 03 | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                            | <b>4.256.176.700</b>  | <b>1.967.763.050,00</b> | <b>1.436.638.565</b> | <b>73,01</b> |
| 42 | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                               | 1.206.303.100         | 537.892.850             | 423.174.908          | 78,67        |
| 43 | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur                                        | 1.206.730.800         | 538.174.850             | 487.558.216          | 90,59        |
| 44 | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian                                         | 1.159.767.100         | 537.474.850             | 398.695.991          | 74,18        |
| 45 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 329.155.200           | -                       | -                    | -            |



|               |                                                                |                       |                       |                         |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 46            | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 354.220.500           | 354.220.500           | 127.209.450             | 35,91        |
| 04            | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                              | <b>1.721.058.200</b>  | <b>1.031.011.475</b>  | <b>332.588.585</b>      | <b>32,26</b> |
| 47            | Pendalaman Tugas DPRD                                          | 1.373.075.750         | 929.780.475           | 297.588.585             | 32,01        |
| 48            | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         | 133.672.000           | 48.731.000            | -                       | -            |
| 49            | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                  | 210.000.000           | 52.500.000            | 35.000.000              | 66,67        |
| 50            | Penyusunan Program Kerja DPRD                                  | 4.310.450             | -                     | -                       | -            |
| 05            | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>         | <b>3.900.971.350</b>  | <b>1.508.007.150</b>  | <b>6.674.600</b>        | <b>0,44</b>  |
| 51            | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                            | 40.007.150            | 40.007.150            | 6.674.600               | 16,68        |
| 52            | Pelaksanaan Reses                                              | 3.860.964.200         | 1.468.000.000         | -                       | -            |
| 06            | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>               | <b>47.879.000</b>     | <b>47.879.000</b>     | <b>14.459.500</b>       | <b>30,20</b> |
| 53            | Pengawasan Kode Etik DPRD                                      | 47.879.000            | 47.879.000            | 14.459.500              | 30,20        |
| 07            | <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                            | <b>1.520.318.000</b>  | <b>408.213.000</b>    | <b>44.946.500</b>       | <b>11,01</b> |
| 54            | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                      | 1.520.318.000         | 408.213.000           | 44.946.500              | 11,01        |
| 08            | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                   | <b>2.326.376.750</b>  | <b>812.265.000</b>    | <b>266.138.881</b>      | <b>32,77</b> |
| 55            | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD               | 2.278.572.250         | 797.440.500           | 257.338.881,00          | 32,27        |
| 56            | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                  | 47.804.500            | 14.824.500            | 8.800.000,00            | 59,36        |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                | <b>45.992.959.352</b> | <b>16.173.165.410</b> | <b>9.942.494.436,00</b> | <b>61,48</b> |

**Tabel 3.33**  
**Belanja Daerah Sekretariat DPRD**  
**Tahun Anggaran 2025**



| No       | Belanja                           | Jumlah Anggaran       | Realisasi            | Persentase   | Sisa                  | Persentase   |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1        | 2                                 | 3                     | 4                    | 5            | 6                     | 7            |
|          | <b>BELANJA</b>                    | <b>45.992.959.352</b> | <b>9.942.494.436</b> | <b>21,61</b> | <b>36.050.464.916</b> | <b>80,08</b> |
| <b>1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>45.212.944.352</b> | <b>9.942.494.436</b> | <b>21,61</b> | <b>12.553.987.271</b> | <b>28,35</b> |
|          | Belanja Pegawai                   | 22.780.089.052        | 6.924.585.726        | 30,39        | 15.855.503.326        | 69,60        |
|          | Belanja Barang dan Jasa           | 22.432.855.300        | 3.017.908.710        | 13           | 19.414.946.590        | 42,41        |
| <b>2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>780.015.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>780.015.000</b>    | <b>0</b>     |
|          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 339.015.000           | 0                    | 0            | 339.015.000           | 0            |
|          | Belanja Modal dan Gedung Bangunan | 441.000.000           | 0                    | 0            | 441.000.000           | 0            |
|          | <b>Total</b>                      | <b>46.488.337.755</b> | <b>9.942.494.436</b> | <b>21,61</b> | <b>36.830.479.916</b> | <b>80,08</b> |

Tabel 3.34

Realisasi Keuangan, Permasalahan/Kendala dan Solusi/Rekomendasi Perbaikan  
Pada Urusan Sekretariat DPRD TW I Tahun 2025

| NO        | PROGRAM/KEGIATAN                                                | JUMLAH ANGGARAN | TARGET TRIWULAN I<br>(BERDASARKAN ANGGARAN KAS) | REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024 |           | TOTAL SISA ANGGARAN |            | PERMASALAHAN / KENDALA                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                 |                 |                                                 | (Rp.)                                   | (%)       | (Rp.)               | (%)        |                                                                                                  |
|           | (2)                                                             | (4)             | (5)                                             | (6)                                     | (7)       | (10)                | (11)       | (12)                                                                                             |
|           |                                                                 |                 |                                                 |                                         | (6/5*100) | (4 - 6)             | (10/4*100) |                                                                                                  |
|           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | 29.212.633.302  | 10.034.327.764,00                               | 7.766.881.505,00                        | 77,40     | 22.594.248.752,00   | 77,34      |                                                                                                  |
| <b>01</b> | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 62.798.550      | 13.731.700,00                                   | 5.340.700                               | 38,89     | 57.457.850,00       | 91,50      |                                                                                                  |
| <b>1</b>  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | 40.197.850      | 9.100.000,00                                    | 5.340.700                               | 58,69     | 34.857.150,00       | 86,71      | Terdapat Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat /Bahan untuk |



Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer yg belum terealisasi

Dilaksanakan Pada TW III

Dilaksanakan Pada TW III

|    |                                                                             |                      |                         |                      |              |                         |              |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|--|
|    |                                                                             |                      |                         |                      |              |                         |              |  |  |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | 5.973.000            |                         |                      | -            | 5.973.000,00            | 100,00       |  |  |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                  | 5.973.000            |                         |                      | -            | 5.973.000,00            | 100,00       |  |  |
| 4  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 11.558.900           | 4.631.700               |                      | -            | 11.558.900,00           | 100,00       |  |  |
| 02 | <b>Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah</b>                           | <b>4.013.272.630</b> | <b>1.390.514.755</b>    | <b>993.846.279</b>   | <b>71,47</b> | <b>3.019.426.351,00</b> | <b>75,24</b> |  |  |
| 5  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | 3.926.248.730        | 1.374.187.055           | 979.410.579          | 71,27        | 2.946.838.151,00        | 75,05        |  |  |
| 6  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 87.023.900           | 16.327.700              | 14.435.700           | 88,41        | 72.588.200,00           | 83,41        |  |  |
| 03 | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>               | <b>24.093.850</b>    | <b>16.520.600,00</b>    | <b>11.870.100</b>    | <b>71,85</b> | <b>12.223.750,00</b>    | <b>50,73</b> |  |  |
| 7  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | 24.093.850           | 16.520.600              | 11.870.100           | 71,85        | 12.223.750,00           | 50,73        |  |  |
| 04 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | <b>581.744.550</b>   | <b>451.820.000,00</b>   | <b>255.645.570</b>   | <b>56,58</b> | <b>326.098.980,00</b>   | <b>56,06</b> |  |  |
| 8  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           | 357.780.000          | 241.820.000             | 154.850.000          | 64,04        | 202.930.000,00          | 56,72        |  |  |
| 9  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  | 223.964.550          | 210.000.000             | 100.795.570          | 48,00        | 123.168.980,00          | 54,99        |  |  |
| 05 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>1.643.296.000</b> | <b>1.444.112.518,00</b> | <b>1.138.175.871</b> | <b>78,81</b> | <b>505.120.129,00</b>   | <b>30,74</b> |  |  |



|    |                                                                  |             |             |             |       |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35.425.000  | 26.568.765  | 23.365.500  | 87,94 | 12.059.500,00 | 34,04 | Jumlah anggaran TW 3 Rp 26.568.765,- terealisasi sebesar Rp 23.365.500,- atau 87,94%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% yang telah di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD                                                                                                                          |
| 11 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 65.500.000  | 65.500.000  | 63.100.000  | 96,34 | 2.400.000,00  | 3,66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 7.142.000   | 5.137.000   | 3.530.000   | 68,72 | 3.612.000,00  | 50,57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 137.009.700 | 112.312.275 | 57.034.000  | 50,78 | 79.975.700,00 | 58,37 | Jumlah anggaran TW 3 Rp 112.312.275,- terealisasi sebesar Rp 57.034.000,- atau 50,788%. (di karenakan adanya rincian objek belanja yang di sediakan dan tidak terealisasi di tw III, rincian objek belanja tersebut yaitu : Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya (tenda) Rp15.750.000, Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat Rp4.200.000 dan Belanja Sewa Alat Studio Lainnya Rp18.000.000 |
| 14 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 260.747.300 | 245.560.475 | 166.097.050 | 67,64 | 94.650.250,00 | 36,30 | Jumlah anggaran TW 3 Rp 245.560.475,- terealisasi sebesar Rp 166.097.050,- atau 67,54%. Capaian Realisasi Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi di TW IV                                                                                                                                                                          |



|    |                                                                  |               |                  |                  |       |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | 247.900.000   | 187.300.000      | 156.000.000      | 83,29 | 91.900.000,00    | 37,07 | Jumlah anggaran TW 3 Rp 187.300.000,- terealisasi sebesar Rp 156.000.000,- atau 83,29%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW IV                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | 261.992.000   | 229.734.003      | 152.312.200      | 66,30 | 109.679.800,00   | 41,86 | Jumlah anggaran TW 3 Rp 229.734.003,- terealisasi sebesar Rp 152.312.200,- atau 66,30%. Terdapat sisa belanja Makan Minum Tamu Hari Besar Keagamaan                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 627.580.000   | 572.000.000      | 516.737.121      | 90,34 | 110.842.879,00   | 17,66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 06 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.147.950.000 | 2.147.950.000,00 | 1.003.091.598,15 | 46,70 | 1.144.858.401,85 | 53,30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 | Pengadaan Mebel                                                  | 534.750.000   | 534.750.000      | 427.900.000,00   | 80,02 | 106.850.000,00   | 19,98 | Jumlah anggaran TW 2 Rp 534.750.000,- terealisasi sebesar Rp 357.900.000,- atau 66,93%. (masih terdapat rincian objek belanja yang belum terealisasi yaitu : Belanja Modal Mebel (Pengadaan Meja Rapat Pimpinan Ruang Paripurna) Rp 70.000.000, (Masih tahap Pengerjaan) dan Belanja Modal Meja Rapat Pejabat ( Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 10 unit) Rp 80.000.000). |
| 20 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 1.527.500.000 | 1.527.500.000    | 489.941.598,15   | 32,07 | 1.037.558.401,85 | 67,93 | Jumlah anggaran TW III Rp 1.527.500.000,- terealisasi sebesar Rp 489.941.598,15,- Dikarenakan kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|    |                                                                                                                    |             |                |               |       |                |       | tersebut masih dalam proses Kontruksi                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 85.700.000  | 85.700.000     | 85.250.000,00 | 99,47 | 450.000,00     | 0,53  | Selesai                                                                                                                                                                                   |
| 07 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 878.469.100 | 631.601.825,00 | 543.367.005   | 86,03 | 335.102.095,00 | 38,15 |                                                                                                                                                                                           |
| 22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 51.429.100  | 38.571.825     | 26.584.000    | 68,92 | 24.845.100,00  | 48,31 | Jumlah anggaran TW 3 Rp 38.571.825,- terealisasi sebesar Rp 17.739.500,- atau 61,71%. Terdapat rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos yang terealisasi di TW IV |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 500.040.000 | 375.030.000    | 299.283.005   | 79,80 | 200.756.995,00 | 40,15 | Jumlah anggaran TW 3 Rp 375.030.000- terealisasi sebesar Rp 299.283005- atau 79,80%. untuk sub kegiatan ini bersifat disediakan karena sifatnya variabel                                  |
| 24 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 327.000.000 | 218.000.000    | 217.500.000   | 99,77 | 109.500.000,00 | 33,49 |                                                                                                                                                                                           |
| 08 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 667.280.000 | 476.434.973,00 | 233.068.100   | 48,92 | 434.211.900,00 | 65,07 |                                                                                                                                                                                           |
| 25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 163.700.000 | 122.775.003    | 75.676.100    | 61,64 | 88.023.900,00  | 53,77 |                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                               |             |             |            |          |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                      | 139.580.000 | 106.160.000 | 33.860.000 | 31,90    | 105.720.000,00 | 75,74  | Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 31,90% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD                                                            |
| 27 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                               | 54.000.000  |             |            | #DIV/0 ! | 54.000.000,00  | 100,00 | TW IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 180.000.000 | 150.000.000 | 55.758.000 | 37,17    | 124.242.000,00 | 69,02  | Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 15,84% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pengecatan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan instalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecatan Taman Kantor |



|    |                                                                                    |                |                   |                |       |                  |       |                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 130.000.000    | 97.499.970        | 67.774.000     | 69,51 | 62.226.000,00    | 47,87 |                                                                                                                                        |
| 09 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                            | 17.795.677.175 | 13.922.410.217,00 | 13.279.701.802 | 95,38 | 4.515.975.373,00 | 25,38 |                                                                                                                                        |
| 30 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                         | 17.041.897.175 | 13.216.630.217    | 12.803.785.402 | 96,88 | 4.238.111.773,00 | 24,87 |                                                                                                                                        |
| 31 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                          | 543.780.000    | 543.780.000       | 388.880.000    | 71,51 | 154.900.000,00   | 28,49 |                                                                                                                                        |
| 32 | Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD                                                  | 210.000.000    | 162.000.000       | 87.036.400     | 53,73 | 122.963.600,00   | 58,55 | Jumlah anggaran Tw III Rp 162.000.000,- terealisasi sebesar 87.036.400 atau 53,74% dikarenakan Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain. |
| 10 | Layanan Administrasi DPRD                                                          | 1.248.000.000  | 936.000.000,00    | 832.000.000    | 88,89 | 416.000.000,00   | 33,33 |                                                                                                                                        |
| 34 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                             | 1.248.000.000  | 936.000.000       | 832.000.000    | 88,89 | 416.000.000,00   | 33,33 |                                                                                                                                        |
|    | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                                 | 17.903.779.061 | 16.830.712.898,00 | 12.948.394.301 | 76,93 | 5.610.556.080,00 | 31,34 |                                                                                                                                        |
| 01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                    | 2.702.699.086  | 2.651.257.288,00  | 2.481.170.419  | 93,58 | 221.528.667,00   | 8,20  |                                                                                                                                        |
| 35 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                          | 550.657.500    | 549.215.700       | 508.655.750    | 92,61 | 42.001.750,00    | 7,63  |                                                                                                                                        |
| 36 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                              | 2.152.041.586  | 2.102.041.588     | 1.972.514.669  | 93,84 | 179.526.917,00   | 8,34  |                                                                                                                                        |
| 02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                      | 1.323.654.550  | 1.323.654.550,00  | 195.500.863    | 14,77 | 1.128.153.687,00 | 85,23 |                                                                                                                                        |



|    |                                    |             |             |            |       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Pembahasan KUA dan PPAS            | 93.142.650  | 93.142.650  | 26.156.980 | 28,08 | 66.985.670,00  | 71,92  | Jumlah anggaran TW III Rp 93.142.650,- terealisasi sebesar Rp26.156.980,- atau 28,08%. Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran |
| 38 | Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS  | 112.495.800 | 112.495.800 | 18.852.835 | 16,76 | 93.642.965,00  | 83,24  | Sub Kegiatan ini telah di laksanakan.Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran                                                   |
| 39 | Pembahasan APBD                    | 378.710.900 | 378.710.900 | -          | -     | 378.710.900,00 | 100,00 | Dilaksanakan Pada TW IV                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | Pembahasan APBD Perubahan          | 379.991.500 | 379.991.500 | 65.500.563 | 17,24 | 314.490.937,00 | 82,76  | Sub Kegiatan ini telah di laksanakan.Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran                                                   |
| 41 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 359.313.700 | 359.313.700 | 84.990.485 | 23,65 | 274.323.215,00 | 76,35  | Jumlah anggaran TW III Rp 359.313.700,- terealisasi sebesar Rp 84.990.485,- atau 23,6%. Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang                     |



|    |                                                                                           |               |                  |               |       |                  |       |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           |               |                  |               |       |                  |       | membutuhkan anggaran                                                                                                                                                                                                |
| 02 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   | 5.777.079.325 | 5.777.079.325,00 | 5.362.137.042 | 92,82 | 414.942.283,00   | 7,18  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 42 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | 1.608.204.300 | 1.608.204.300    | 1.496.612.070 | 93,06 | 111.592.230,00   | 6,94  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 43 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 1.884.465.425 | 1.884.465.425    | 1.760.365.965 | 93,41 | 124.099.460,00   | 6,59  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 1.711.571.800 | 1.711.571.800    | 1.631.600.709 | 95,33 | 79.971.091,00    | 4,67  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 45 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 278.782.700   | 278.782.700      | 242.745.490   | 87,07 | 36.037.210,00    | 12,93 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | 294.055.100   | 294.055.100      | 230.812.808   | 78,49 | 63.242.292,00    | 21,51 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 04 | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                | 2.189.120.000 | 1.864.119.010    | 1.070.856.250 | 57,45 | 1.118.263.750,00 | 51,08 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 47 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 1.757.588.500 | 1.557.038.510    | 869.856.250   | 55,87 | 887.732.250,00   | 50,51 | Tidak ditarget pada TW III oleh karena masa transisi oleh Anggota periode 2019-2024 ke periode 2024-2029                                                                                                            |
| 48 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | 133.221.000   | 113.770.000      | 30.000.000    | 26,37 | 103.221.000,00   | 77,48 | Disdiakan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan                                                                                                                                                                   |
| 49 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | 294.000.000   | 189.000.000      | 168.000.000   | 88,89 | 126.000.000,00   | 42,86 | Jumlah Tenaga ahli dari masing-masing fraksi yang terbentuk pasca pelantikan Dewan :<br>1. Fraksi PDI-Perjuangan,<br>2. Fraksi Dasdem,<br>3. Fraksi Pan,<br>4. Fraksi Golkar,<br>5. Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat |



|    |                                                  |                |                |                   |       |                   |       |                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | Penyusunan Program Kerja DPRD                    | 4.310.500      | 4.310.500      | 3.000.000         | 69,60 | 1.310.500,00      | 30,40 | Berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan, untuk penetapan renja akan dilaksanakan pada saat alat kelengkapan terbentuk |
| 05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat  | 1.368.538.900  | 1.368.538.900  | 549.988.547       | 40,19 | 818.550.353,00    | 59,81 |                                                                                                                        |
| 51 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD              | 40.251.850     | 40.251.850     | 20.236.975        | 50,28 | 20.014.875,00     | 49,72 |                                                                                                                        |
| 52 | Pelaksanaan Reses                                | 1.328.287.050  | 1.328.287.050  | 529.751.572       | 39,88 | 798.535.478,00    | 60,12 |                                                                                                                        |
| 06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD        | 47.866.000     | 47.866.000     | 31.000.800        | 64,77 | 16.865.200,00     | 35,23 |                                                                                                                        |
| 53 | Pengawasan Kode Etik DPRD                        | 47.866.000     | 47.866.000     | 31.000.800        | 64,77 | 16.865.200,00     | 35,23 |                                                                                                                        |
| 07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah                     | 1.445.300.000  | 1.073.075.000  | 886.756.500       | 82,64 | 558.543.500,00    | 38,65 |                                                                                                                        |
| 54 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi        | 1.445.300.000  | 1.073.075.000  | 886.756.500,00    | 82,64 | 558.543.500,00    | 38,65 |                                                                                                                        |
| 08 | Fasilitasi Tugas DPRD                            | 3.049.521.200  | 2.725.122.825  | 2.370.983.880     | 87,00 | 678.537.320,00    | 22,25 |                                                                                                                        |
| 55 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 3.001.852.700  | 2.689.371.450  | 2.346.681.380,00  | 87,26 | 655.171.320,00    | 21,83 |                                                                                                                        |
| 56 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | 47.668.500     | 35.751.375     | 24.302.500,00     | 67,98 | 23.366.000,00     | 49,02 |                                                                                                                        |
|    |                                                  | 46.488.337.755 | 40.157.381.282 | 32.787.292.082,15 | 81,65 | 13.701.045.672,85 | 29,47 |                                                                                                                        |



Tabel 3.35

Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan , Permasalahan/Kendala dan Solusi/Rekomendasi  
Perbaikan Pada Urusan Sekretariat DPRD TW I Tahun 2024

| NO<br>AN | PROGRAM/KEGIAT                                                        | PERMASALAHAN TERKAIT<br>PENCAPAIAN KINERJA (SECARA<br>TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL<br>MAUPUN<br>FAKTOR EKSTERNAL)                                      | PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI<br>KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOLUSI                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                                                   | (3)                                                                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (5)                                                                                                                     |
| 1,0      | Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| 01       | Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|          | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                    | Indikator Capaian Kinerja :<br>Jumlah Dokumen Perencanaan<br>yang disusun tepat waktu target<br>2 Dokumen dan terealisasi 1<br>dokumen atau 100%      | Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 1<br>sebesar Rp. 9.934.700,- Realisasi Keuangan<br>Rp 5.340.700 atau 38,46% ( Terdapat<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Alat Tulis Kantor,Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dan<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer yg belum terealisasi ) | untuk belanja yang belum<br>teralisasi akan dilakukan evaluasi<br>kinerja dan evaluasi realisasi<br>keuangan pada TW II |
|          |                                                                       | Indikator Capaian Kinerja :<br>Jumlah Jasa Tenaga administrasi<br>yang terbayarkan setiap<br>bulannya, target 2 orang<br>teralisasi 2 orang atau 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|          | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan ini dilaksanakan di<br>TW II                                                                               |
|          | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD                         | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang<br>disusun tepat waktu (Dokumen)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan ini dilaksanakan di<br>TW II                                                                               |
|          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Indikator : Jumlah laporan kinerja<br>perangkat daerah yang disusun<br>tepat waktu Target 10 Dokumen<br>Terealisasi 3 dokumen atau 30 %               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| 2        | Administrasi Keuangan dan<br>Perangkat Daerah                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |



|   |                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                             |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Indikator Capaian Kinerja :<br>Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan Dengan target 27 Orang dan terealisasi 27 Orang atau 100%                               | Jumlah anggaran TW I Rp.1.374.187.055,-<br>teralisasi sebesar Rp 979.410.579,-, atau 71,21% |  |  |
|   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Indikator : Jumlah Honorarium PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran Yang Terbayarkan Dengan target 2 Orang danbelem terealisasi dikarenakan menunggu SK                  | Jumlah anggaran TW I Rp16.327.700,-<br>teralisasi sebesar Rp14.435.700,-, atau 88,41%       |  |  |
|   |                                                                             | Indikator : Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu dengan target 10 laporan dan terealisasi 3 Dokumen atau 16.67% |                                                                                             |  |  |
|   |                                                                             | Indikator : Jumlah Tenaga Upah Jasa Administrasi Keuangan Yang Terbayarkan<br>Target sebanyak 3 Orang dan Terealisasi 3 Orang atau 100%                               |                                                                                             |  |  |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                             |  |  |
|   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun. Target 4 dokumen terealisasi 1 dok atau 25%                                          | Jumlah anggaran TW I Rp5.538.525,-<br>teralisasi sebesar Rp 0,-                             |  |  |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                             |  |  |
|   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           | Jumlah laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang Dimutahirkan Target 4 dok. Realisasi 1 dok atau 25%                                                                 | Jumlah anggaran TW I Rp 41.960.000,-<br>teralisasi sebesar Rp31.800.000,- atau 75,797%.     |  |  |
|   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Target 27 Orang realisasi                                                   | Jumlah anggaran TW I Rp 113.964.550,-<br>Belum terealisasi.                                 |  |  |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                             |  |  |



|    |                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                       |                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target 9 Jenis realisasi 9 Jenis atau 100% | Jumlah anggaran TW I Rp 8.700.000,- terealisasi sebesar Rp5.193.000,- atau 59,69%.    |                                        |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan .Target 5 jenis. Belum terealisasi karena dilaksanakan di TW II |                                                                                       |                                        |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                | Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan. Target 2 Jenis terealisasi 2 Jenis atau 100%                              | Jumlah anggaran TW I Rp 2.025.000,- terealisasi sebesar Rp750.000,- atau 37,4%.       |                                        |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | Jumlah Bahan Logistik Yang Disediakan . Target 2 jenis realisasi 2 jenis atau 100%                                       | Jumlah anggaran TW I Rp59.193.000,- terealisasi sebesar Rp 15.272.300,- atau 25,80%.  |                                        |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan. Target 2 Jenis realisasi 2 jenis atau 100%                          | Jumlah anggaran TW I Rp10.000.000,- terealisasi sebesar Rp5.345.450,- atau 53,43%.    |                                        |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan. Target 2412 exp realisasi 603 exp atau 25%         | Jumlah anggaran TW I Rp 61.975.000,- terealisasi sebesar Rp 40.000.000,- atau 64,54%. |                                        |
|    | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         | Jumlah Tamu Yang Difasilitasi (Orang) 12 laporan terealisasi 3 laporan atau 25%                                          | Jumlah anggaran TW I Rp 53.677.000,- terealisasi sebesar Rp 15.762.000,- atau 29,36%. |                                        |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | Jumlah Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan                                                         | Jumlah anggaran TW I Rp 147.000.000,- terealisasi sebesar Rp49.805.240,- atau 33,88%. |                                        |
|    |                                                                                  | Jumlah Upah Jasa Sopir Yang Terbayarkan. Target 6 orang terealisasi 6 orang atau 100%                                    |                                                                                       |                                        |
| 06 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 |                                                                                                                          |                                                                                       |                                        |
|    | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan                                     |                                                                                       | Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW II |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan. Target 4 Unit belum terealisasi, karena dilaksanakan di TW II  |                                                                                       | Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW II |
| 07 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |                                                                                                                          |                                                                                       |                                        |



|           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda. Target 3 Laporan dan Terealisasi 3 Laporan atau 100 %                                              | Jumlah anggaran TW I Rp 13.176.200,- terealisasi sebesar Rp12.541.000,- atau 95,18%.                                                       |                                                                                                                |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan. Target 9 Rek dan terealisasi 9 rek atau 100%                          | Jumlah anggaran TW I Rp125.010.000,- terealisasi sebesar Rp 94.322.844,- atau 75,45%.                                                      |                                                                                                                |
|           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Yang Terbayarkan. Target 21 Orang dan terealisasi 21 Orang atau 100%                                               | Jumlah anggaran TW I Rp 62.500.000,- terealisasi sebesar Rp 58.000.000,- atau 92,80%.                                                      |                                                                                                                |
| <b>08</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Target 3 Unit dan terealisasi 3 Unit atau 36.36%                                | Jumlah anggaran TW I Rp 70.000.00- terealisasi sebesar Rp 6.377.500,- atau 9,11%. dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW II    | untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II |
|           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target 190 unit realisasi                                                                   | Jumlah anggaran TW I Rp 24.930.000- terealisasi sebesar Rp 11.2100.00,- atau 44,97%. dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW II |                                                                                                                |
|           | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Barang Milik daerah Yang Diasuransikan. Target 6 Unit dan belum terealisasi karena dilaksanakan di TW II                                 |                                                                                                                                            | Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW IV                                                                         |
|           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 1 Unit realisasi 1 Unit atau 100%                            | Jumlah anggaran TW I Rp 54.500.000,- terealisasi sebesar Rp 17.896.000,- atau 32,84%                                                       |                                                                                                                |
|           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 1 Unit Realisasi 1 Unit atau 100%        | Jumlah anggaran TW I Rp50.000.00,- terealisasi sebesar Rp 17.141.000,- atau 34,28%                                                         |                                                                                                                |
| <b>09</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|           | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | Indikator Capaian Kinerja :Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan 35 Orang Terealisasi 35 Orang atau 100% | Jumlah anggaran Rp 6.621.023.559,- terealisasi sebesar Rp 5.945.175.147,- atau 89,79                                                       | untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II |



|           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                 | Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Diadakan. Target 30 Stel belum terealisasi karena dilaksanakan di TW II                                                                                               | Jumlah anggaran Rp 693.240.000,- terealisasi sebesar Rp 234.700.000,- atau 33,89%. Dikarenakan pendaan pakaian dinas untuk thn 2025 ini dilaksanakan d TW II. | untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II |
|           | Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD                         | Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Check-UP Target 30 Orang Realisasi 0% dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.                                                                                  | Jumlah anggaran Tw I Rp 60.000.000,- terealisasi sebesar 0 %. dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.                                                | Akan dilakukan Penjadwalan ulang MCU d TW II                                                                   |
| <b>10</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|           | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                    | Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Bahan /Perlengkapan Ruimah Tangga Yang Disediakan Target 3 Jenis Terealisasi 3 Jenis atau 100%                                                                                               | Jumlah anggaran TW I Rp 320.400.000,- terealisasi sebesar Rp 203.903.045 atau 63,64 %.                                                                        |                                                                                                                |
| <b>ii</b> | <b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|           | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|           | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                 | Indikator Capaian Kinerja : Jumlah kajian perundang-undangan yang diselenggarakan Target TW 6 Ranperda dan Terealisasi 5 Ranperda dikarenakan yang berproses ada 1 buah ranperda (Hari Ulang Tahun Lutim) yang ditarik kembali. | Jumlah anggaran Rp 60.748.537,- terealisasi sebesar Rp 4.810.000.atau 7,29 %. <b>Di Jelaskan</b>                                                              |                                                                                                                |
|           | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                     | Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Raperda yang dibahas Target TW 6 Ranperda dan Terealisasi 5 Ranperda dikarenakan yang berproses ada 1 buah ranperda yang ditarik kembali.                                                    | Jumlah anggaran Rp 302.950.434,- terealisasi sebesar Rp 69.356.300 atau 22.89 %.                                                                              |                                                                                                                |
| <b>12</b> | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|           | Pembahasan KUA dan PPAS                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | Dilaksanakan Pada TW II                                                                                        |
|           | Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | Dilaksanakan Pada TW II                                                                                        |
|           | Pembahasan APBD                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | Dilaksanakan Pada TW IV                                                                                        |



|           |                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Pembahasan APBD Perubahan                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Dilaksanakan Pada TW III                                                                                       |
|           | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| <b>13</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|           | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                               | Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Dan Hukum Target TW I 1 dikumen dan Terealisasi 1 Dok atau 100%            | Jumlah anggaran TW I Rp 537.892.850 terealisasi sebesar Rp 423.174.908,- atau 78,67%                                                |                                                                                                                |
|           | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur                                        | Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Bidang Infrastruktur Target TW I 1 dikumen dan Terealisasi 1 Dok atau 100% | Jumlah anggaran TW I Rp 538.174.850,- terealisasi sebesar Rp 487.558.216,- atau 90,59 %.                                            |                                                                                                                |
|           | Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian                                         | Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Target TW I 1 dikumen dan Terealisasi 1 Dok atau 100%                    | Jumlah anggaran TW I Rp 537.474.850,- terealisasi sebesar Rp 398.695.991,- atau 74,18%.                                             |                                                                                                                |
|           | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Dilaksanakan di TW II                                                                                          |
|           | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Dilaksanakan di TW II                                                                                          |
| <b>14</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|           | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Bimtek yang Diikuti Oleh Pimpinan Dan Anggota DPRD dengan target 1 kali realisasi 1 kali atau 100% ( Bimtek diselenggarakan oleh Partai Politik)        | Jumlah anggaran TW I Rp 467.800.425,- terealisasi sebesar Rp 69.619.458,- atau 14.88%.                                              |                                                                                                                |
|           | Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Tim Pakar Dan Tim Ahli Yang disediakan target : 1 oarng dan terealisasi 1 orang atau 0 (Disediakan sesuai dengan kebutuhan dari alat Kelengkapan)       | Jumlah anggaran TW I Rp 48.731.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0%. (Disediakan sesuai dengan kebutuhan dari alat Kelengkapan) |                                                                                                                |
|           | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Jumlah Tim Ahli Fraksi. Target 6 Orang Realisasi 6 atau 100%. ( Disediakan berdasarkan Usulan dari Fraksi                                                      | Jumlah anggaran TW I Rp 52.500.000,- terealisasi sebesar Rp 35.000.000,-                                                            | untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II |
|           | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Dilaksanakan TW III                                                                                            |



|    |                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                       |  |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 15 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                       |  |
|    | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD              |                                                                                                                                                                | Jumlah anggaran TW I Rp 40.007.150-<br>terrealisasi sebesar Rp 6.674.600,- Atau<br>16,68%                                                                          |                                                       |  |
| -  | Pelaksanaan Reses                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                       |  |
| 16 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                       |  |
|    | Pengawasan Kode Etik DPRD                        | Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD. Target 3 kali terealisasi 1 kali atau 33.33%                                                                                 | Jumlah anggaran TW I Rp 47.879.000,-<br>terrealisasi sebesar Rp 11.360.000,- Atau<br>30.04%                                                                        |                                                       |  |
| 17 | Pembahasan Kerja Sama Daerah                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                       |  |
|    | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi        | Jumlah Kegiatan Yang Dipublikasikan. Target 27 Laporan Realisasi 27 Jenis atau 100%                                                                            | Jumlah anggaran TW I Rp 408.213.000,-<br>terrealisasi sebesar Rp 44.946.500,- Atau<br>11,01%                                                                       |                                                       |  |
| 18 | Fasilitasi Tugas DPRD                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                       |  |
|    | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan                                                                                   | Jumlah anggaran TW I Rp 797.440.500,-<br>terrealisasi sebesar Rp 257.338.881,- Atau<br>32,27%                                                                      |                                                       |  |
|    | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi. Target 3 kali terealisasi 3 laporan atau 100%, dikarenakan Perubahan Jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah | Jumlah anggaran Rp 14.824.500,- terealisasi sebesar Rp8.800.000,- atau 59,36 %.<br>(Perubahan Jadwal akan berimplikasi dengan jumlah rapat yang akan dilaksanakan. | Jumlah rapat agar disesuaikan dengan jumlah anggaran. |  |



**BAB 4****PENUTUP****3.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja TW I Tahun 2025 Sekretariat DPRD Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan hasil analisa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, bahwa capaian indikator utama sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                               | Target tahun 2025 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 100%              |
|     |                                                                                                                                                                                    | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti                                | 100%              |
| 2   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD                                                                                                                                | Niali SAKIP                                                                     | 80                |

**Capaian Indikator Kinerja Utama**

Rata-rata nilai capaian indikator dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD.

| No. | Sasaran                                                                                 | Indikator Kinerja                                                               | Target | Target TW I | Realisasi TW I | Capaian | Keterangan       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|---------|------------------|
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi | Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda | 100%   | 25%         | 20%            | 80%     | Sangat Memuaskan |



|   |                                                                                             |                                                  |       |                                                                                                                         |    |    |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|
|   | Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik | Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti | 100   | 0%                                                                                                                      | 0% | 0% | Belum Terlaksana |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD                                         | Niali SAKIP                                      | 80.00 | Belum dapat diukur karena nilai realisasinya baru akan bisa didapatkan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) |    |    |                  |

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan capaian kinerja utama di TW I tahun 2025 sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

Penyerapan anggaran belanja langsung dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 45.992.959.352,- terealisasi sebesar Rp. 9.942.494.436,- atau persentase capaian sebesar 21,61%.

### 3.2 Langkah Perbaikan Kinerja

1. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang terkait.
2. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan *stakeholder*)
3. Melaksanakan rapat koordinasi staf pertriwulan lingkup Sekretariat DPRD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan di setiap Bidang teknis pada lingkup Sekretariat DPRD.

### 3.3 Saran

Dalam mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, diharapkan :

1. Dukungan sumber daya manusia dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi



birokrasi lebih nyata perubahannya.

2. Dukungan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Sekretariat DPRD.
  3. Mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang dianggap masih rendah.
  4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Peningkatan penyampaian informasi satu data.
- 3.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Kinerja TW IV pada Tahun 2024 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja TW IV  
Sekretariat DPRD  
Tahun 2024**

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Aksi Tidak Lanjut                                                                                                                                                         | Penanggung Jawab | Status/progres penyelesaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | Agar Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja                                                                                                                                                                                                                   | Telah Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja                                                                                                      | Sekretariat DPRD | selesai                     |
| 2  | Agar seluruh pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja selaras dengan perjanjian kinerja atasannya secara terstruktur dan lengkap dengan penjelasan operasional dan formulasi perhitungan                                                                                         | Telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja Perjanjian Kinerja dan SKP (kinerja individu).                                                                                | Sekretariat DPRD | selesai                     |
| 3  | Melakukan Evaluasi berjenjang dan membuat laporan kinerja individu                                                                                                                                                                                                                            | Laporan Kinerja sudah dilakukan berjenjang mulai dari level staf hingga level Pimpinan yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja                                                    | Sekretariat DPRD | selesai                     |
| 4  | Melakukan Sosialisai/Rapat intern terkait perencanaan kinerja sehingga setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, tidak hanya dibebankan kepada sub bagian perencanaan tetapi tanggungjawab dari level pimpinan sampai dengan staf | Telah melakukan sosialisai/rapat intern setiap bulannya dan pertriwulan agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan | Sekretariat DPRD | selesai                     |



|   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                  |         |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--|
| 5 | Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level dan melakukan evaluasi berjenjang sampai pada tingkat staf | Pengukuran kinerja telah dilakukan berjenjang berupa Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (LKj) dari level staf, Kasubag, Kabag hingga Eselon 2 (Sekretaris Dewan) | Sekretariat DPRD | selesai |  |
| 6 | Laporan Evaluasi Periodik dibuat berdasarkan Permenpan 53 tahun 2014                                      | Sistematika Penyusunan LAKIP sudah berdasarkan pada BAB III Permen PAN&RB Nomor 5 53 Tahun 2014                                                                      | Sekretariat DPRD | selesai |  |
| 7 | Penyajian Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai                              | Telah dilakukan Evaluasi Internal setiap Triwulan                                                                                                                    | Sekretariat DPRD | selesai |  |



# **LAMPIRAN**



**PPID**  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kabupaten Lumajang Timur

[e-PPID](#) [Galeri](#) [tentang PPID](#) [Maklumat dan SOP](#) [Informasi Publik](#) [Layanan Informasi](#) [LIRKPA](#) [PRJ](#) [PPID Pelaksanaan](#) [Akun Saya](#)

### Hasil Penelusuran

Show 10 entries

Search: PERJANJIAN KINERJA ES

| No | Judul                                | Tahun | Penerbit         |                          |
|----|--------------------------------------|-------|------------------|--------------------------|
| 10 | PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2025 | 2025  | Sekretariat DPRD | <a href="#">Download</a> |

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 12 total entries)

[Previous](#) [Next](#)

**PPID**  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kabupaten Lumajang Timur

[e-PPID](#) [Galeri](#) [tentang PPID](#) [Maklumat dan SOP](#) [Informasi Publik](#) [Layanan Informasi](#) [LIRKPA](#) [PRJ](#) [PPID Pelaksanaan](#) [Akun Saya](#)

### Hasil Penelusuran

Show 10 entries

Search: POHON KINERJA SEKR

| No | Judul                          | Tahun | Penerbit         |                          |
|----|--------------------------------|-------|------------------|--------------------------|
| 9  | POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD | 2025  | Sekretariat DPRD | <a href="#">Download</a> |

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 12 total entries)

[Previous](#) [Next](#)

**PPID**  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kabupaten Lumajang Timur

[e-PPID](#) [Galeri](#) [tentang PPID](#) [Maklumat dan SOP](#) [Informasi Publik](#) [Layanan Informasi](#) [LIRKPA](#) [PRJ](#) [PPID Pelaksanaan](#) [Akun Saya](#)

### Hasil Penelusuran

Show 10 entries

Search: POHON KINERJA SEKR

| No | Judul                          | Tahun | Penerbit         |                          |
|----|--------------------------------|-------|------------------|--------------------------|
| 9  | POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD | 2025  | Sekretariat DPRD | <a href="#">Download</a> |

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 12 total entries)

[Previous](#) [Next](#)





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
**M A L I L I, 92981**

Malili, 2 April 2025

Nomor : 003/Und/Set.DPRD/II/2024

Lampiran :-

Perihal : Rapat

Kepada :

Yth. Sekretaris DPRD, Kabag, Kasubag  
Fungsional dan Staf Sekretariat

DPRD

di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat internal terkait Evauasi Kinerja  
TW I Tahun 2025 di Lingkup Sekretariat DPRD Daerah ini yang in syaa Allah akan  
dilaksanakan pada ;

Hari/tanggal : Rabu, 02 April 2025

Waktu : Pukul 09.00-selesai

Tempat : Ruang rapat Aspirasi DPRD

Demikian disampaikan, diucapkan terimakasih.

Malili , 2 April 2025

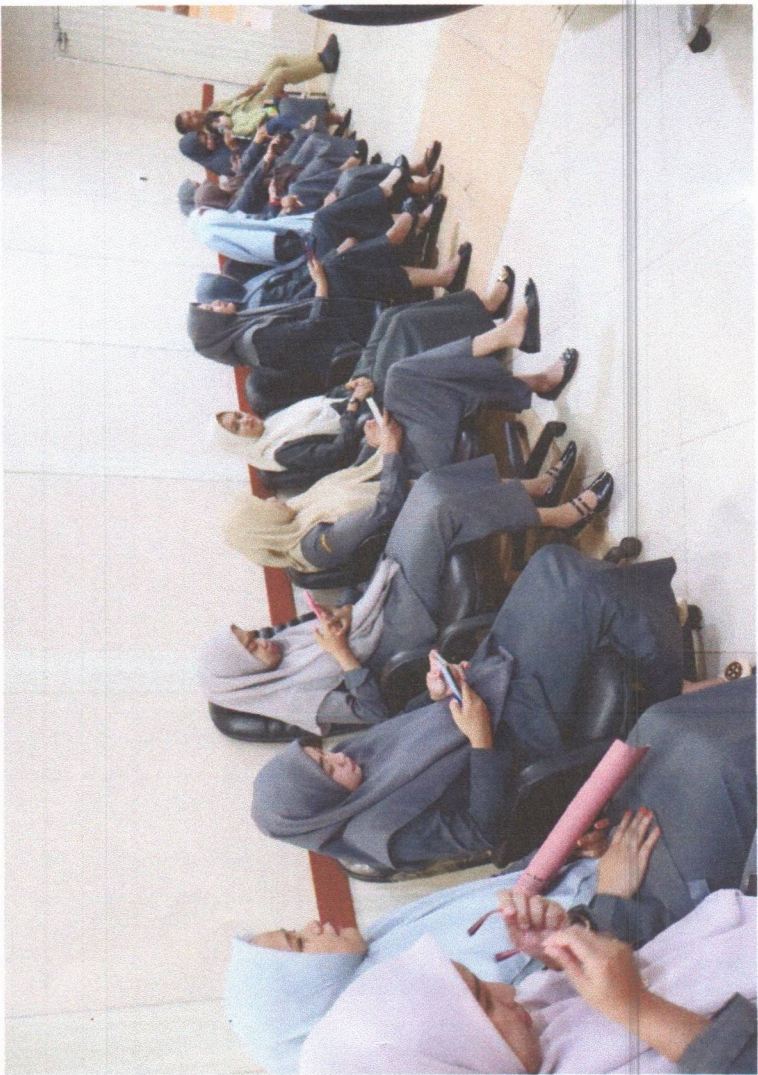
Sekretaris Dewan

**ASWAN AZIS. S.Pi. M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP 19760316200801001









SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Email : [sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id](mailto:sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id) Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

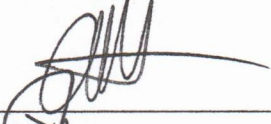
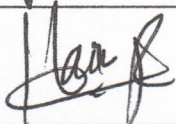
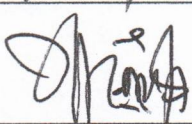
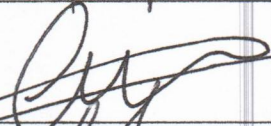
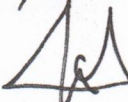
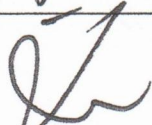
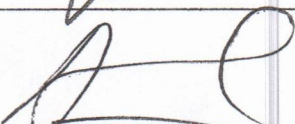
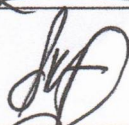
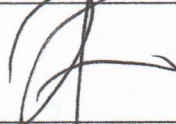
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu / 20 April 2025  
Waktu : 09.00  
Tempat : Ruang Aspirasi  
Agenda :

| NO  | NAMA             | JABATAN                | JENIS<br>KELAMIN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|------------------------|------------------|--------------|
| 1.  | Agung Azis       | sekur                  | L                |              |
| 2.  | YUNITA ANGELA    | kabag umum             | P                |              |
| 3.  | Parinawanti      |                        | P                |              |
| 4.  | ET. HAFSAH       | Kabag provinsi<br>nyam | P                |              |
| 5.  | Nurhayati        | fungsi                 | P                |              |
| 6.  | CHATERIN         | P. Purnama             | L                |              |
| 7.  | HENDRA           |                        | L                |              |
| 8.  | SUSANA, SAN      | kasubag umum           | P                |              |
| 9.  | SYAMSUL. S       | stat                   | L                |              |
| 10. | Ana Besse P      | 2f                     | P                |              |
| 11. | Andi Aisyah Padu | stat                   | P                |              |



| NO    | NAMA                  | JABATAN   | JENIS KELAMIN | TANDA TANGAN                                                                          |
|-------|-----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 12. | Hurul Aulia Ramadhani | Staff     | P             |    |
| ✓ 13. | Sarkika D             | "         | P             |    |
| ✓ 14. | Bisma p.s             | "         | P             |    |
| ✓ 15. | Murianti              | "         | P             |    |
| ✓ 16. | Semiaty               | "         | -             |    |
| ✓ 17. | Ismawati              | "         | P             |    |
| ✓ 18. | Ranawati              | Prof Umum | P             |   |
| ✓ 19. | INDRI ANI             | Staff     | P             |  |
| ✓ 20. | MARJ. ANTO            | Staff     | L             |  |
| ✓ 21. | FADHILA               | "         | L             |  |
| ✓ 22. | AGUS                  | "         | L             |  |
| ✓ 23. | Intan                 | "         | L             |  |
| 24.   | ASHULI                | "         | L             |  |
| ✓ 25. | CIPTO                 | "         | L             |  |
| ✓ 26. | Hageratung            | "         | P             |  |



| NO    | NAMA           | JABATAN        | JENIS KELAMIN | TANDA TANGAN |
|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| ✓ 27. | Gerhana Sari   | Graf           | P             | Gf           |
| ✓ 28. | Nurkamillah    | -              | P             | NK           |
| ✓ 29  | Ranti Dewi     | -              | P             | Rd           |
| 30.   | Aliani Gani    | -              | P             | AG           |
| 31    | Mustika Ayu    | -              | P             | MA           |
| 32    | ISARTI, LASSI  | -              | P             | IS           |
| 33.   | Hermawati, S   | -              | P             | HS           |
| ✓ 34  | Usad Apriah P  | -              | P             | UP           |
| ✓ 35  | Eka Sumartani  | -              | P             | ES           |
| ✓ 36  | Rati Lestari P | Asst Magang    | P             | RL           |
| ✓ 37  | Royah Annang   | Funegronal     | P             | RA           |
| ✓ 38  | ARYLA PUTRI M  | Staf           | P             | AP           |
| ✓ 39. | Zetrawati      | Bendahara      | P             | ZR           |
| ✓ 40  | Kartini        | Kerub. program | P             | KR           |
| ✓ 41  | HAERUDIN       | Staf           | L             | HA           |



[illegible]